

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM PENGADAAN BIBIT  
BAWANG MERAH DI KABUPATEN BIMA**

Adi Ardiansyah

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: adiardiansyah199993@Gmail.com

Dr. Asep Nurjaman, M.Si

Dosen jurusan ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: asep\_nurjaman@yahoo.com

Dra. Su'adah, M.Si

Dosen jurusan ilmu kesejahteraan sosial, FISIP, Universitas Muhammadiyah  
Malang

Email: suadah@umm.ac.id

**ABSTRAK**

Tuntutan dan desakan peningkatan nilai produksi bawang merah di kabupaten Bima, di picu oleh adanya kebutuhan terhadap bawang merah, yang semakin hari semakin meningkat. Kebutuhan tersebut bukan hanya di daerah kabupaten Bima melainkan di daerah-daerah lain juga melakukan tuntutan yang sama, sehingga perlu untuk di tumbuh kembangkan. Mengingat daerah kabupaten Bima merupakan daerah yang berproduksi bawang merah, serta sebagian besar masyarakat tersebut sangat tergantung dari hasil produksi bawang merah.

Berdasarkan input tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang peningkatan nilai produksi dan produktivitas bawang merah, dengan mengacu pada peraturan menteri pertanian no. 18 tahun 2012 pangan, SK ditjen hortikultura No. 29 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan program bantuan pemerintah serta undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mencukupi atas kebutuhan nasional terhadap bawang merah. Berdasarkan kebijakan tersebut petani berhasil meningkatkan nilai produksi dan produktivitas pertanian bawang merah sebanyak 24,7% dari tahun sebelumnya. Namun dengan demikian, pemerintah gagal dalam mencapai sasaran kepada kelompok tani sebagai target

utama kebijakan tersebut serta tidak tepat waktu, karena tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan penanaman bawang merah yang dilakukan oleh petani.

Kata kunci: *efektivita, kebijakan program, tidak tepat sasaran, tidak tepat waktu, hambatan.*

## ABSTRACT

for increased value of onion production in Bima regency is triggered by the need for onion, which is increasing every day. The need is not only in the district of Bima but in other areas also do the same demands, so it is necessary to grow. Given the area of Bima district is an area of onion-producing, and most of the community is highly dependent of onion production.

With these inputs the government issued a policy on increasing the value of production and onion productivity, with reference to the regulation of agriculture minister no. 18 year 2012 food, SK Directorate General of Horticulture No. 29 of 2016 on technical guidelines for the management of government aid programs and Law no. 19 of 2013 on protection and empowerment of farmers. policy in an effort to meet the national need for onion. Based on the policy, the farmers succeeded in increasing the value of production and productivity of shallots farming by 24.7% from the previous year. However, the government failed to achieve the target to the farmer group as the main target of the policy and not timely, because it is not in accordance with the timing of the implementation of onion planting done by farmers.

**Key word:** *effectiveness, program policies, not on target, on time, no obstacles*

## A. Pendahuluan

Bawang merah merupakan tanaman hortikultura musiman yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Bawang merah juga merupakan kelompok sayuran non-komplementer sehingga berpengaruh pada tingkat inflasi<sup>1</sup>. Untuk menghindari fluktuasi harga yang disebabkan oleh biaya tanam, transportasi dan lainnya, perlu ada upaya untuk melakukan budidaya bawang merah sepanjang tahunnya. Pencapaian ketahanan pangan nasional merupakan salah satu pilar pembangunan yang sangat fundamental bagi kemajuan pembangunan<sup>2</sup>. Ditinjau dari segi ekonomi wilayah, bawang merah merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bawang merah merupakan salah satu penyumbang inflasi karena harganya yang fluktuatif. Oleh karenanya bawang merah menjadi komoditas penting dan strategis.

Pada mulanya Bima merupakan daerah yang penghasil bawang merah. Sekitar 65% penduduknya memiliki ketergantungan yang besar terhadap pendapatan di bidang pertanian. Karena sumber mata pencaharian masyarakat Bima pada umumnya berada di bidang pertanian bawang merah. Salah satu produk unggulan daerah kabupaten Bima, dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi adalah bawang merah artinya bahwa pemerintah perlu mendorong serta mengembangkan potensi tersebut, melalui kebijakan unggulan yang dapat memberikan sumbangan terhadap kebutuhan nasional.

---

<sup>1</sup> Menurut pusat kajian hortikultura tropika, LLPM, IPB, yang dimaksud dengan kelompok sayuran non komplementer atau kelompok sayuran utama yang fungsinya tidak dapat di gantikan dengan jenis sayuran lain, sehingga harga sayuran ini akan berpengaruh pada tingkat inflasi. Diakses pada tanggal 08 April 2018

<sup>2</sup> Undang-undang no. 18 tahun 2012 tentang pangan.

Meskipun demikian, pemerintah kabupaten Bima belum mampu mencukupi kebutuhan tersebut, mengingat keterbatasan produksi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menstabilkan suplay bawang merah dengan melakukan pengembangan luas tanam baru dan melakukan intensifikasi guna dapat meningkatkan nilai produksi. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan ingin mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Untuk menstabilkan harga, maka pemerintah melalui kementrian pertanian dan bulog melakukan kerja sama guna dapat mencukupi stok dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

- a) Peningkatan dan perluasan areal pertanian untuk kawasan tanaman pangan dan hortikultura melalui pengelolaan lahan kering dengan kegiatan optimasi pemanfaatan lahan dan sumber daya air.
- b) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura guna mengamankan target produksi nasional.
- c) Mengembangkan argo industri baik industri hulu maupun hilir.

Program kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai produksi dan produktivitas bawang merah dikabupaten bima, serta dapat berkontribusi langsung terhadap kebutuhan nasional. Kebijakan tersebut diatas menunjukan bahwa terdapat tiga poin penting untuk mendorong meningkatkan ketersediaan stok dan menstabilkan harga bawang merah.

## **B. Metode**

Jenis yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Adapun data yang dikumpulkan, diolah dan di analisa bersifat primer maupun sekunder. Sumber data primer terdiri dari kelompok-kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), badan penyuluh pertanian dan dinas pertanian kabupaten bima. adapun data sekunder dalam penelitian ini, dapat diperoleh dari arsip laporan, dokumen resmi, majalah, Koran, internet dan lain sebagainya yang dapat menunjang dalam penulisan ini. Selain itu, variable-variabel yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah efektivitas kebijakan program bantuan bibit bawang merah dari pemerintah kepada kelompok tani sebagai target sasaran yang dapat menerima bantuan dan disertai dengan ketepatan waktu pembagian bibit berdasarkan kebutuhan kelompok tani yang ada.

## **C. Tinjauan Teori**

### **1. Teori efektivitas**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas dari david J. Lawless untuk melihat kinerja pemerintah kabupaten bima dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Menurut david J, lawless mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu antara lain: *pertama* Efektifitas individu: Efektifitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi, *kedua* Efektifitas kelompok: adanya pandangan bahwa pada kenyataanya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan

jumlah kontribusi dari semua anggota kelompok. Dan yang *ketiga*, Efektifitas organisasi: Efektifitas organisasi terdiri dari efektifitas individu dan kelompok melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya<sup>3</sup>.

Aliran ini menunjukkan bahwa betapa besarnya pengaruh individu di dalam suatu lembaga pemerintah, sehingga dapat mempengaruhi maju atau mundurnya suatu organisasi. Individu dalam hal ini, mereka yang memiliki otoritas dan wewenang serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan memiliki yurisdiksi yang jelas dan tepat. Didalam yurisdiksi seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi yang memperjelas batas-batas kewenangan pekerjaan sesuai dengan pola hierarki dari tingkatan kekuasaannya<sup>4</sup>. Sedangkan kelompok adalah gabungan individu yang secara sadar bekerja sama dengan individu lainnya guna mencapai tujuan bersama. Artinya dalam suatu lembaga maupun organisasi, individu harus mampu bekerja sama dengan individu lainnya, guna dapat berkontribusi terhadap kemajuan lembaga maupun program kegiatan yang dilakukan Guna mencapai target yang telah di tentukan.

#### **a. Ukuran efektivitas**

Untuk mengukur tentang efektifnya suatu kebijakan pemerintah tentang program bantuan tersebut, antara lain:

- 1) Efektivitas sasaran kebijakan program pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Bima adalah kelompok tani, yang dianggap sebagai

---

<sup>3</sup> Bagus w. yeni 2013. *Efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)* di kabupaten jombang (studi di SDN 1 dan SMP II kabupaten jombang). Skripsi hal. 20-21 lab. Ip UMM.

<sup>4</sup> Mifta toha. 2010. *Birokrasi dan politik di Indonesia*; PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta, Hal;3.

individu yang secara ekonominya lemah akan mendapatkan bantuan bibit bawang merah.

- 2) Efektivitas Waktu pelaksanaan pembagian bibit bawang merah, harus dilakukan pada bulan februari sampai dengan bulan maret, sesuai dengan kebutuhan petani. hal ini sejalan dengan kebiasaan pola tanam petani di kabupaten Bima. Di waktu tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindar adanya kerusakan tanam yang di akibatkan oleh curah hujan yang begitu tinggi, serta dapat mengakibatkan kegagalan panen untuk petani. karena petani sering kali terjadinya kegagalan dalam meningkatkan nilai produksi pertaniannya, diakibatkan oleh pola tanam dibulan yang tidak tepat.

#### **D. Pembahasan.**

##### **1. Efektivitas kebijakan program pengadaan bibit bawang merah**

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna dapat menyejahterakan masyarakat. Melalui kebijakan, pemerintah dapat bekerja secara optimal berdasarkan porsi dan kewenangan instansi terkait<sup>5</sup>. Sama halnya dengan kebijakan pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Bima. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bima dalam mencukupi ketersediaan stok serta dapat berkontribusi besar terhadap kebutuhan nasional.

Pengembangan agribisnis bawang merah ditujukan untuk meningkatkan produksi dan menjaga kesinambungan pasokan, sehingga dapat mengurangi

---

<sup>5</sup> Nurjaman, A., Susilo, R. K. D., & Sulistyaningsih, T. (2006). *Kebijakan elitis politik Indonesia*. FISIP UMM.

ketergantungan pada impor. Potensi lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima seluas 18.075 Ha. baik pada lahan sawah maupun pada lahan kering dan tersebar di beberapa wilayah kecamatan, potensi pengembangan baru dari lahan kering 5.431 Ha. Hal ini merupakan daya dukung yang sangat besar dalam mengembangkan agribisnis bawang merah<sup>6</sup>.

Pengembangan tersebut diarahkan pada perluasan area tanam dan pengembangan sentra produksi benih unggul. Potensi area tanam ditujukan di lahan kering, sehingga dapat ditanam di musim hujan dan menghasilkan bawang merah *off season* untuk memenuhi pasokan yang kurang pada musim hujan guna dapat mengamankan target ketahanan pangan nasional. Dalam rangka menunjang tujuan dan merealisasikan program tersebut, perlu ada kemampuan sumber daya manusia yang profesional yang dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan dengan mengacu pada 3 hal:

- a) **Akuntabilitas** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan untuk pemerataan ekonomi dan politik. Sebab sejalan dengan istilah desentralisasi itu sendiri, logika penyebaran wewenang dan kekuasaan yang menjadi landasan dalam tata kelola pemerintahan.
- b) **Responsivitas** artinya bukan hanya dimaknai sebagai kemampuan pemerintah lokal untuk menanggapi kebutuhan dan keperluan warga setempat tetapi lebih jauh dari pada itu, yaitu adanya kemauan untuk

---

<sup>6</sup> Dinas pertanian kabupaten Bima tahun 2015. Di akses pada tanggal 08 April 2018.



mendistribusikan pelayanan publik tidak pernah terlaksana secara optimal selama sistem sentralisasi berkuasa<sup>7</sup>.

- c) **Transparansi.** Keterbukaan terkait pengelolaan penggunaan anggaran maupun informasi yang berkaitan langsung dengan kebijakan program bantuan pemerintah tersebut guna menghindari adanya penyalahgunaan anggaran dan lainnya.

Kebijakan program pengadaan bibit bawang merah tersebut diperuntukan untuk kelompok tani sebagai sasaran target yang telah ditetapkan dalam rencana program pemerintah kabupaten Bima. Artinya bahwa bagi petani yang tergabung dalam kelompok tersebut akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 25 kg perorang. Sedangkan jumlah satu kelompok terdapat 20-40 orang anggota yang akan menerima bantuan dari pemerintah. Sedangkan total jumlah kelompok 2,596 kelompok tani yang tersebar di 13 kecamatan dan 108,028 anggota penerima bantuan, yang telah ditetapkan oleh surat keputusan desa atas usulan dari gabungan kelompok tani (gapoktan) kepada badan penyuluh pertanian dan penyuluh pertanian merekomendasikan kepada dinas pertanian guna pengesahan penerimaam bantuan dari pemerintah.

## **2. Factor Penghambat Efektivitas Kebijakan Program Bantuan Pemerintah**

Peran Pemerintah dalam merealisasikan kebijakan program pengadaan bibit bawang merah tersebut kurang optimal, sehingga cenderung terjadinya kelalaian yang dapat mengancam terwujudnya kebijakan yang efektif dan efisien. Hal ini ditinjau berdasarkan pelaksanaan pembagian dilapangan yang sering kali terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaksana tugas lapang

---

<sup>7</sup> Agustino, leo: 2014 *Politik lokal dan otonomi daerah*. Alfabeta. Bandung. Hal ; 04

atau dengan kata lain penangkar benih dan bibit. Pada tahap pembagian bibit, peran pemerintah dalam mengontrol kegiatan tersebut sangat terbatas. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program kegiatan, yang sering kita temui dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang bekerja untuk mengelola dan mengaplikasikan kebijakan pemerintah, sehingga luaran kebijakan yang diharapkan tidak tepat sasaran.
- b. Perlu adanya peran kontrol pemerintah guna dapat menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki.
- c. Perlu adanya kerja sama yang intens antara individu dengan kelompok guna dapat berkontribusi terhadap kemajuan organisasi.
- d. Perlu adanya lembaga penguatan yang bersifat independen untuk mengontrol berjalannya roda organisasi pemerintah, serta menghindari adanya penyalahgunaan anggaran.

## **E. Diskusi Hasil**

### **1. Efektivitas Program Kebijakan Bantuan Pemerintah**

Dalam rangka mengawal pelaksanaan visi dan misi dinas pertanian tanaman pangan dan horticultura kabupaten Bima, diperlukan adanya kebijakan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat. Dengan keberadaan kebijakan yang unggul, pemerintah dapat bekerja dengan optimal guna dapat menunjang tujuan, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang

diberikan. Visi dan misi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merancang program kerja pemerintah untuk di laksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi potensi sumber daya lokal.

Berdasarkan peraturan menteri pertanian No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan surat keputusan ditjen hortikultura No. 29 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengelolaan program bantuan pemerintah serta undang-undang No. 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. landasan filosofis kebijakan tersebut dituangkan untuk menjamin ketahanan pangan nasional, dengan memanfaatkan potensi daerah, melalui pengembangan lahan dan peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

Namun pada prinsipnya kebijakan program pengadaan bibit bawang merah dilakukan sebagai upaya untuk menyediakan keterbatasan stok, yang berdasarkan kebutuhan nasional. keberadaan bawang merah di kabupaten bima mampu berkontribusi besar terhadap kebutuhan bawang merah nasional. hal ini di dorong oleh adanya perluasan serta pengembangan lahan dan peningkatan nilai produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura di kabupaten Bima.

Berdasarkan kebijakan bantuan tersebut, pemerintah berhasil menggenjot meningkatkan nilai produksi bawang merah dari tahun 2015 sebanyak 125.057 Ton. Akan tetapi pada tahun 2016 petani mampu memproduksi bawang merah sebanyak 170.873 Ton atau terealisasi sekitar 24,7% dari hasil jumlah peningkatan nilai produksinya pada tahun lalu atau mengalami surplus produksi sebanyak 33,398 Ton. Hal ini merupakan hasil

capaian petani dalam meningkatkan nilai produksi bawang merah dalam waktu satu tahun. Meskipun berhasil dalam meningkatkan nilai produksi, akan tetapi target sasaran serta waktu pelaksanaan pembagian bibit tidak sesuai dengan kebutuhan petani,

**a. Tidak tepat Sasaran**

Ketidaktepatan sasaran di artikan sebagai ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mana target sasaran yaitu kelompok tani yang telah di tetapkan sebelumnya pada saat rencana pelaksanan program kebijakan pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Bima. pelaksanaan pembagian bibit tersebut seharusnya diterima oleh kelompok tani yang telah ditetapkan dan bukan petani yang diluar kelompok. Apa bila ada penerimaan yang dilakukan oleh petani diluar kelompok, maka tentu kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan berakibat fatal terhadap tumbuh suburnya produksi pertanian yang berkelanjutan, sehingga jumlah barang yang diterima oleh kelompok sah cenderung berkurang.

Kekurangan tersebut di akibatkan oleh adanya penerima melebihi kuota yang telah di tentukan sebelumnya, sehingga bibit tersebut tidak terbagi rata oleh kelompok tani yang seharusnya menerima bantuan. masing-masing anggota kelompok mendapatkan 25 Kg dengan jumlah anggota 20-24 orang per kelompok. Sasaran bantuan tersebut adalah kelompok tani yang telah di SK kan oleh kepala desa dan ditetapkan oleh dinas sebagai calon penerima bantuan bibit bawang merah.

#### **b. Ketidak tepatan Waktu**

Ketidaktepatan waktu merupakan ketidak sesuaian antara rencana program kebijakan pemerintah yang di tetapkan berdasarkan hasil musyawarah strategi pembangunan jangka menengah pemerintah daerah dalam kurung waktu satu tahun, seperti rencana kerja program pengadaan bibit bawang merah di kabupaten Bima. Pelaksanaan pembagian bibit bawang merah yang dilakukan oleh pemerintah melalui penangkar tersebut tidak tepat waktu. Adapun maksud ketidaktepatan waktu tersebut bahwa seharusnya pemerintah dalam merealisasikan kebijakan harus sesuai dengan pola tanam petani. Dalam hal ini bahwa petani biasanya mekukan aktivitas cocok tanam tepat di bulan Februari-Maret, karena itu petani dapat memproduksi pertanian tanaman bawang merah tersebut sebanyak-banyaknya, agar dapat menyesuaikan dengan target kebutuhan serta dapat mencapai tujuannya yaitu ketahanan pangan nasional tersebut.

Proses pelaksanaan pembagian bibit bawang merah dilakukan pada bulan agustus sampai oktober, maka produksi bawang dari petani akan mengalami penurunan dan bahkan akan mengancam keberlangsungan hidup petani, sehingga pendapatan petani tersebut cenderung akan mengalami penurunan yang drastis. Dalam arti bahwa mengingat kebiasaan petani dalam menanam bawang merah di kabupaten Bima dari tahun-ketahun itu tepat pada bulan Februari- Maret. Hal ini menunjukan kebijakan tersebut tidak tepat waktu. Artinya bahwa kebijakan tersebut jelas memaksa masyarakat tani untuk menanam bawang merah di bulan September, padahal petani tidak pernah menanam diwaktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan rentetan waktu yang begitu panjang,

sehingga partisipasi masyarakat terhadap program kebijakan dari pemerintah tersebut cenderung mengalami penurunan, apalagi dengan kondisi harga yang tidak stabil seperti sekarang ini.

## **2. Faktor Penghambat Efektifitas Kebijakan Program Bantuan Bibit Bawang Merah**

1. Pelaksanaan pembagian bibit bawang merah yang tidak tepat sasaran; ketidaktepatan sasaran tersebut di dilihat dari adanya petani diluar kelompok yang menerima bantuan bibit bawang merah, dengan jumlah yang diterima sebesar 25 - 40 kg. hal ini diungkapkan oleh pelaku penerima bantuan tersebut dengan alasan membayar biaya administrasi berdasarkan biaya yang diminta oleh pengelola yaitu penangkar. Ketidaktepatan sasaran tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran, karena adanya penerimaan bantuan tersebut diluar yang telah ditetapkan. hal tersebut diakibatkan oleh kurang optimalnya kinerja pemerintah dalam mengontrol pembagian bibit bawang merah sampai ketingkat kelompok tersebut.
2. Tidak tepat waktu: artinya bahwa adanya pembagian bibit bawang merah yang tidak sesuai dengan kebutuhan pola tanam dari petani dengan pembagian bawang merah yang ditarget serta dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan kemoloran waktu yang begitu panjang dari kebiasaan pola tanam yang telah di lakukan oleh petani dari tahun-ketahunya, yaitu tepat pada bulan Februari-maret. Artinya bahwa apabila pemerintah melakukan pembagian bibit bawang merah di bulan September, maka petani cenderung akan menjual kembali kepada penangkar. Hal ini pernah terjadi pada saat peneliti berada di lapangan untuk melakukan observasi terkait masalah ini, karena sering peneliti

melihat kasus yang sama di lakukan oleh pemerintah dari tahun ketahun semenjak di keluarkannya kebijakan tersebut tanpa melakukan perbaikan, sehingga sampai sekarang dilakukan cenderung berulang-ulang.

3. Masih terdapat adanya politik praktis yang dilakukan oleh dinas terkait pada saat perekrutan calon penangkar dan calon lapang. Hal itu dapat mempengaruhi proses penetapan calon sebagai penangkar, sehingga kinerjanya berdasarkan pesan atasan dan bukan berdasarkan kualitas individu dan dapat mengakibatkan kinerja yg tidak professional.
4. Minimnya kemampuan Sumberdaya manusia yang bekerja untuk mengelola program pengadaan bibit bawang merah tersebut, dapat berdampak besar terhadap pelaksanaan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan petani di kabupaten bima.
5. Tidak ada gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan *cool storage* karena bawang merah cepat sekali rusak. Perlu gudang penyimpanan sehingga tidak merugikan petani jika musim panen tiba.
6. Kelembagaan penangkar benih dan modal untuk usaha penangkaran masih kurang karena jumlah penangkar terbatas dengan menggunakan modal seadanya dari petani itu sendiri, sehingga perlu dukungan modal usaha dari pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003).
- Agustino, leo: 2014 Politik lokal dan otonomi daerah. Alfabeta. Bandung
- Basuki, rofik Sinung. 2013. *Sistem Pengadaan dan Distribusi Benih Bawang Merah pada Tingkat Petani di Kabupaten Brebes; jurnal*.
- Bagus w. yeni 2013. Efektifitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kabupaten jombang (studi di SDN 1 dan SMP II kabupaten jombang). Skripsi FISIP-UMM.
- Mifta thoha. 2010. Birokrasi dan politik di Indonesia; PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta,
- Nurjaman, A., Susilo, R. K. D., & Sulistyaningsih, T. (2006). *Kebijakan elitis politik Indonesia*. FISIP UMM.
- Solichin. 2015. *Analisis kebijakan dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan public*. Bumi aksar. Jakarta
- Wahono, francis, taufikul mujib, sayogyo, astute dwi dan Hendry: 2001. *Ekonomi politik pangan, kembali ke basis: dari ketergantungan ke kedaulatan*.

### Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Pertanian No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Surat Keputusan Ditjen Holtikultural No. 29 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Bantuan Pemerintah.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.



**Internet:**

[https://www.researchgate.net/publication/308120605\\_potensi\\_penggunaan\\_true\\_seshallot\\_tss\\_sebagai\\_sumber\\_benih\\_bawang\\_merah\\_di\\_indonesia](https://www.researchgate.net/publication/308120605_potensi_penggunaan_true_seshallot_tss_sebagai_sumber_benih_bawang_merah_di_indonesia) di akses pada tanggal 27 april 2017

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/63518/4/bab%2520i%2520pendahuluan.pdf>